

# REMITANSI DIGITAL DAN EKONOMI INKLUSIF: KONTRIBUSI TERHADAP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

## DIGITAL REMITTANCES AND INCLUSIVE ECONOMY: CONTRIBUTION TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN INDONESIA

<https://10.0.205.137/jikk.v8i2.788>

Submitted: 02-07-2025 Reviewed: 13-07-2025 Published: 26-08-2025

Ali Mustafa Kemal Lubis  
alimustafakemallubis@gmail.com  
Politeknik Pengayoman  
Indonesia

Mochammad Ryanindityo  
ryanindityo@gmail.com  
Politeknik Pengayoman  
Indonesia

Rita Kusuma Astuti  
ritakusumaastuti@gmail.com  
Politeknik Pengayoman  
Indonesia

**Abstract (In English).** This study aims to examine the role of digital remittances in driving an inclusive economy and its contribution to sustainable development in Indonesia. In recent years, digital remittances through fintech platforms have become increasingly popular and offer great potential to expand financial access and boost the economic welfare of communities, especially in areas where migrant workers originate. This study uses a qualitative descriptive approach with a literature study method involving content analysis and thematic analysis of various sources of scientific literature, policy documents, and related institutional reports. The results of the study indicate that digital remittances play a strategic role in increasing transaction efficiency, financial transparency, and security of fund transfers, which significantly strengthens the inclusive economy at the local level. However, its implementation is still constrained by minimal digital literacy, uneven technological infrastructure, and less adaptive regulations. The main conclusion of this study is that optimizing digital remittances requires strong cross-sector collaboration and strategic policies that support financial inclusion in order to effectively achieve sustainable development goals in Indonesia.  
**Keywords:** Digital Remittance; Inclusive Economy; Sustainable Development; Financial Inclusion; Fintech.

**Abstract (In Bahasa).** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran remitansi digital dalam mendorong ekonomi inklusif serta kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, remitansi digital melalui platform fintech semakin populer dan menawarkan potensi besar untuk memperluas akses keuangan serta mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya di daerah asal pekerja migran. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi pustaka yang melibatkan analisis isi dan analisis tematik terhadap berbagai sumber literatur ilmiah, dokumen kebijakan, dan laporan institusional terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa remitansi digital berperan strategis dalam meningkatkan efisiensi transaksi, transparansi keuangan, dan keamanan pengiriman dana, yang secara signifikan memperkuat ekonomi inklusif di tingkat lokal. Meski demikian, implementasinya masih terkendala oleh minimnya literasi digital, infrastruktur teknologi yang belum merata, serta regulasi yang kurang adaptif. Kesimpulan utama penelitian ini adalah bahwa optimalisasi remitansi digital memerlukan kolaborasi lintas sektor yang kuat dan kebijakan strategis yang mendukung inklusi keuangan guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara efektif di Indonesia.

**Keywords:** Remitansi Digital; Ekonomi Inklusif; Pembangunan Berkelanjutan; Inklusi Keuangan; Fintech.



## 1. PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, remitansi telah menjadi salah satu sumber devisa yang signifikan bagi Indonesia, dengan total remitansi mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun. Menurut data Bank Indonesia jumlah remitansi yang dikirimkan oleh pekerja migran Indonesia atau PMI sejumlah Rp 253,3 triliun (setara dengan USD 15,7 miliar). Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengatakan remitansi ini berasal dari transaksi 297.000 pekerja migran Indonesia dengan daerah penyumbang pekerja migran terbanyak berasal dari Jawa Timur, kemudian disusul Jawa Barat, Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat (Rachman, 2025).

Penempatan Pekerja Migran Indonesia tersebar di berbagai negara, dengan lima negara tujuan utama yaitu Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Jepang, dan Singapura. Adapun lima jenis pekerjaan yang paling banyak diisi oleh para PMI meliputi asisten rumah tangga, perawat lansia, buruh umum, pekerja perkebunan, serta pekerja domestik lainnya. Remitansi ini umumnya dikirimkan oleh para Pekerja Migran Indonesia (PMI) kepada keluarga mereka di tanah air. Kesadaran para Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam mengelola keuangan menunjukkan tren positif, ditandai dengan meningkatnya kecenderungan untuk menabung dan mengirimkan sebagian besar pendapatannya kepada keluarga di tanah air. Pola perilaku ini mencerminkan pengendalian konsumsi selama bekerja di luar negeri serta kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal melalui remitansi, yang mendorong perputaran ekonomi di daerah asal mereka. Seiring dengan perkembangan teknologi digital dan layanan finansial berbasis teknologi (fintech), terjadi perubahan signifikan dalam pola pengiriman remitansi, yakni dari cara-cara konvensional (transfer bank, agen remitansi fisik) menuju remitansi digital berbasis aplikasi, dompet digital (e-wallet), maupun platform fintech lainnya.

Perkembangan remitansi digital ini menawarkan peluang besar dalam mendukung peningkatan ekonomi inklusif di Indonesia. Konsep ekonomi inklusif memungkinkan pembangunan ekonomi dengan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah (Sri Hartati, 2021). Dalam hal ini, remitansi digital berpotensi memperluas akses layanan keuangan, meningkatkan kapasitas ekonomi rumah tangga migran, serta mendorong terciptanya usaha produktif di daerah asal migran.

Namun demikian, implementasi remitansi digital di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah minimnya literasi digital masyarakat, infrastruktur teknologi yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia, dan regulasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan fintech. Di sisi lain, agenda global melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals - SDGs) menekankan pentingnya inklusi keuangan, pengurangan ketimpangan sosial-ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat sebagai kunci pembangunan berkelanjutan. Sustainable Development Goals (SDGs) adalah program pembangunan berkelanjutan yang disusun negara-negara anggota PBB pada 2015 dan diharapkan tercapai pada 2030. SDGs berisi 17 tujuan yang harus dicapai dengan prinsip universal, integrasi dan inklusif, untuk meyakinkan bahwa tidak ada satupun yang tertinggal (Pristiandaru, 2023).

Dalam konteks ini, remitansi digital bisa menjadi instrumen penting yang mendukung pencapaian berbagai target SDGs, antara lain pengentasan

kemiskinan, kehidupan sehat dan sejahtera, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, serta pengurangan ketimpangan. Sampai saat ini, kajian-kajian terdahulu mengenai remitansi masih didominasi oleh studi-studi yang bersifat parsial. Banyak penelitian yang hanya menyoroti remitansi konvensional atau aspek dampak ekonomi remitansi secara umum, tanpa secara spesifik mengintegrasikan tiga elemen penting sekaligus: remitansi digital, ekonomi inklusif, dan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Ini merupakan sebuah gap research yang penting untuk dijawab, mengingat bahwa integrasi ketiga elemen tersebut sangat krusial dalam menentukan efektivitas remitansi digital sebagai instrumen pembangunan ekonomi dan sosial yang inklusif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, sangat penting untuk melakukan penelitian yang secara spesifik membahas hubungan remitansi digital, ekonomi inklusif, dan kontribusinya terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah akademik yang selama ini belum banyak disentuh oleh para peneliti, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pemanfaatan remitansi digital secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat luas.

## **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif sebagai landasan dalam menjelaskan dan menganalisis fenomena remitansi digital dalam kaitannya dengan ekonomi inklusif dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam terhadap makna, pola, dan hubungan antar konsep berdasarkan data sekunder yang bersumber dari berbagai literatur dan dokumen relevan. Dalam konteks ini, peneliti berusaha menggali dan mendeskripsikan pentingnya ketiga aspek tersebut secara keterkaitan konseptual dan kontekstual berdasarkan data yang ada.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka (*library research*), yang dilakukan dengan menelaah secara sistematis berbagai sumber literatur yang relevan. Studi pustaka dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin menggali dan menganalisis keterkaitan antara remitansi digital, ekonomi inklusif, dan kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) di Indonesia. Sumber data diperoleh dari jurnal ilmiah, laporan institusi resmi, dokumen kebijakan instansi terkait, buku, peraturan perundang-undangan dan publikasi web resmi. Melalui studi pustaka ini, peneliti dapat mengidentifikasi konsep konsep kunci, tren empiris, serta temuan-temuan terdahulu yang menjadi dasar untuk menjelaskan bagaimana remitansi digital berperan dalam memperluas inklusi ekonomi dan mendukung agenda pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal maupun nasional.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi dan analisis tematik, yang bertujuan untuk mengkaji keterkaitan antara remitansi digital, ekonomi inklusif, dan pembangunan berkelanjutan. Melalui analisis isi, peneliti mengidentifikasi informasi penting dari berbagai literatur dan dokumen kebijakan yang relevan. Selanjutnya, analisis tematik digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam tema-tema utama. Kedua teknik ini digunakan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai peran strategis

remitansi digital dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

### **3. PEMBAHASAN**

#### **3.1. HUBUNGAN REMITANSI DIGITAL DAN EKONOMI INKLUSIF DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

Remitansi merupakan layanan pengiriman atau penerimaan dana dalam bentuk valuta asing yang dilakukan berdasarkan tujuan atau motivasi tertentu, baik ke atau dari pihak lain di dalam maupun luar negeri. Proses ini dilakukan melalui perantara bank koresponden di luar negeri. Pelaksanaan transaksi remitansi hanya dapat dilakukan oleh bank yang telah memperoleh izin operasional sebagai bank devisa dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Pratama, 2022). Seiring berjalannya waktu tren positif ditunjukkan oleh PMI dalam mengirimkan remitansinya. Meningkatnya kecenderungan untuk menabung dan mengirimkan sebagian besar pendapatannya kepada keluarga di tanah air adalah salah satu faktor yang menandai tren positif pada remitansi oleh PMI di Indonesia.

Para migran cenderung merasa memiliki tanggung jawab sosial untuk mengalokasikan sebagian dari pendapatan mereka guna mendukung kebutuhan ekonomi keluarga inti maupun keluarga besar di kampung halaman. Dukungan finansial ini umumnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti konsumsi, tempat tinggal, layanan kesehatan, dan pendidikan, serta untuk membiayai peristiwa penting seperti pernikahan dan pemakaman, termasuk juga untuk mendukung pemulihan ekonomi pascabencana alam. Namun biaya transaksi pengiriman uang ke negara Indonesia termasuk kedalam biaya yang tinggi dengan kisaran biaya 5\$ - 25\$ per transaksinya. Penelitian telah menunjukkan bahwa remitansi memiliki elastisitas biaya negatif; yaitu, semakin rendah biaya pengiriman uang, semakin besar jumlah transfer. Hal ini sesuai dengan hukum permintaan: semakin rendah harga, semakin tinggi jumlah yang dikonsumsi (Gibson et al., 2006).

Penurunan biaya transaksi remitansi berpotensi mengurangi ketergantungan migran terhadap saluran pengiriman informal dalam mengirimkan dana kepada keluarga mereka. Jalur informal, seperti pengiriman tunai secara langsung melalui individu, kurir tidak resmi, kerabat, atau teman, memiliki tingkat risiko kehilangan yang lebih tinggi dan kurang terjamin dari segi keamanan. Dengan demikian, pengalihan remitansi ke jalur formal tidak hanya meningkatkan keamanan transaksi, tetapi juga mendorong transparansi keuangan. Pengurangan aktivitas dalam sektor informal memberikan manfaat bagi perekonomian, karena data remitansi yang lebih akurat akan memperkuat kekuatan neraca nasional. Akurasi tersebut selanjutnya dapat meningkatkan efektivitas regulasi dan pengawasan terhadap arus keuangan lintas batas.

Dalam satu dekade terakhir, kemajuan teknologi telah menjadi faktor kunci dalam mendorong transformasi di berbagai sektor, termasuk sektor keuangan. Di Indonesia, perkembangan financial technology (FinTech) telah membawa perubahan fundamental terhadap struktur dan mekanisme layanan keuangan. FinTech merujuk pada serangkaian inovasi berbasis teknologi yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, memperluas inklusi keuangan, serta mempermudah akses masyarakat

terhadap layanan keuangan secara lebih luas dan berkelanjutan (Norliani et al., 2024).

Remitansi digital muncul sebagai bentuk baru pengiriman uang lintas negara yang memanfaatkan teknologi finansial (fintech), aplikasi mobile banking, serta dompet digital (e-wallet). Di era sains dan teknologi, remitansi digital dianggap sebagai sumber pendapatan dan investasi yang paling sesuai dan berkelanjutan (Saud et al., 2024). Remitansi digital dipandang sebagai salah satu sumber devisa yang paling stabil dan handal dibandingkan dengan sumber lainnya, seperti investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment (Mowlaei, 2018). Remitansi ini juga dianggap memiliki potensi strategis sebagai mekanisme pembiayaan dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam situasi krisis maupun perlambatan ekonomi, remitansi menunjukkan karakteristik yang relatif resisten, terdistribusi luas, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, sinergi antara remitansi digital dan agenda SDGs menjadi topik penting yang terus dikaji oleh PBB, kalangan akademisi, organisasi internasional, serta para pembuat kebijakan (Scott et al., 2018).

Di sisi lain, ekonomi inklusif juga berperan penting dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Prioritas pembangunan ekonomi di Indonesia saat ini yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif dan berkelanjutan (Rany et al., 2020). Ekonomi inklusif merupakan pendekatan pembangunan yang bertujuan untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat memperoleh akses yang setara terhadap sumber daya dan peluang ekonomi, sekaligus berupaya mengurangi disparitas antar kelompok sosial dan mewujudkan tingkat kesejahteraan yang merata (Zahrah & Rahayu, 2024). Menurut Badan Perencanaan Nasional (Bappenas, 2019) terdapat tiga pilar yang digunakan untuk mengukur ekonomi inklusif baik di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, yaitu:

- Pilar pertama mencakup aspek pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, yang terdiri dari subpilar: pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta pembangunan infrastruktur ekonomi.
- Pilar kedua berfokus pada pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan, dengan subpilar meliputi tingkat ketimpangan dan prevalensi kemiskinan.
- Pilar ketiga menekankan pada perluasan akses dan peluang, yang mencakup penguatan kapabilitas sumber daya manusia, penyediaan infrastruktur dasar, serta pengembangan keuangan yang inklusif.

Remitansi digital berperan penting dalam pembangunan berkelanjutan karena memungkinkan pengiriman uang lintas negara secara cepat, aman, dan efisien melalui teknologi finansial. Akses yang lebih mudah ini membantu keluarga migran memenuhi kebutuhan dasar, mendukung usaha kecil, dan memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga, terutama di daerah terpencil. Dengan demikian, remitansi digital

tidak hanya menjadi alat transfer dana, tetapi juga instrumen yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara merata. Remitansi berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) terutama dengan mengurangi kemiskinan, mendorong kesetaraan gender, dan mendukung pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, ekonomi inklusif mendukung pembangunan berkelanjutan dengan memastikan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, memiliki akses yang setara terhadap peluang ekonomi. Pendekatan ini mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan produktif, memperkuat keadilan sosial, dan mengurangi kesenjangan. Dengan ekonomi yang lebih terbuka dan merata, hasil pembangunan dapat dirasakan lebih luas dan berkelanjutan oleh seluruh masyarakat.

### **3.2. PENTINGNYA OPTIMALISASI REMITANSI DIGITAL UNTUK MENDORONG EKONOMI INKLUSIF DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

Optimalisasi remitansi digital memiliki urgensi tinggi dalam mendukung ekonomi inklusif dan pencapaian SDGs di Indonesia. Optimalisasi terhadap sistem remitansi yang telah tersedia memiliki potensi besar dalam mendorong perluasan inklusi keuangan di Indonesia. Remitansi sendiri merupakan bentuk transaksi yang lazim dilakukan oleh masyarakat. Berdasarkan data SOFIA tahun 2017, lebih dari 60% masyarakat melakukan pengiriman atau penerimaan dana baik dalam skala domestik maupun internasional dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Meskipun demikian, metode pengiriman secara tunai masih mendominasi praktik remitansi. Kondisi ini mencerminkan adanya peluang signifikan untuk mengembangkan layanan dan produk keuangan digital yang mampu menyediakan mekanisme transfer dana yang lebih efisien, mudah diakses, dan terjangkau (Bhegawati & Novarini, 2023). Optimalisasi remitansi digital mampu memperkuat daya tahan ekonomi rumah tangga migran terhadap guncangan ekonomi, khususnya dalam situasi krisis seperti pandemi COVID-19.

Namun demikian, implementasi remitansi digital di Indonesia masih menghadapi tantangan, dan tantangan tersebut tidak lepas dari infrastruktur, sumber daya manusia dan regulasi. Liu et al. (2021) mengidentifikasi tiga hambatan utama, yaitu belum meratanya infrastruktur digital, rendahnya tingkat literasi digital, serta kerumitan dalam aspek regulasi. Di Indonesia, ketimpangan akses infrastruktur digital antara wilayah Jawa dan luar Jawa menjadi salah satu isu strategis yang perlu mendapat perhatian khusus. Meskipun terdapat berbagai tantangan, kondisi tersebut sekaligus menghadirkan peluang bagi pengembangan sektor fintech. Salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan adalah kolaborasi antara penyedia layanan fintech dan lembaga keuangan konvensional guna memperluas cakupan layanan kepada masyarakat. Selain itu, penerapan kerangka regulasi yang adaptif menjadi aspek penting dalam menciptakan iklim inovasi yang sehat, sekaligus menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan nasional (Kim & Park, 2021).

Fakta-fakta tersebut memberikan implikasi strategis bagi perumusan kebijakan yang lebih responsif. Pertama, diperlukan investasi

yang berkelanjutan dalam pembangunan infrastruktur digital guna mengatasi kesenjangan akses antarwilayah. Kedua, diperlukan penguatan program literasi digital dan literasi keuangan secara terpadu untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan layanan keuangan berbasis teknologi. Ketiga, pengembangan kerangka regulasi yang adaptif dan inovatif perlu diupayakan agar dapat mendorong pertumbuhan sektor fintech tanpa mengabaikan aspek perlindungan konsumen.

Optimalisasi remitansi digital diharapkan tidak hanya meningkatkan ekonomi inklusif tetapi juga menciptakan multiplier effect terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Optimalisasi ini diharapkan mampu memberikan pengaruh positif kepada remitansi terhadap pertumbuhan ekonomi, yang semakin diperkuat dalam konteks ekonomi inklusif. Optimalisasi ini semakin mempertegas peran ekonomi inklusif dalam memaksimalkan dampak ekonomi remitansi, khususnya melalui peningkatan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta pendanaan bagi usaha mikro. Dengan memperluas akses terhadap layanan keuangan formal, ekonomi inklusif berkontribusi dalam memastikan bahwa dana remitansi dialokasikan secara optimal ke sektor-sektor produktif yang mendukung pembangunan berkelanjutan, alih-alih terfokus pada konsumsi atau investasi jangka pendek semata (Khan et al., 2025).

Remitansi telah menjadi sumber pendapatan penting bagi jutaan rumah tangga di negara berkembang dan memberikan manfaat ekonomi dalam jangka pendek. Namun demikian, keberlanjutan manfaat tersebut memerlukan strategi kebijakan yang lebih terarah dan jangka panjang. Meskipun aliran remitansi memberikan kontribusi nyata terhadap pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga, seperti konsumsi harian dan stabilitas ekonomi keluarga, para pembuat kebijakan perlu memahami bahwa remitansi tidak dapat dianggap sebagai solusi menyeluruh bagi tantangan struktural ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan yang secara strategis mengarahkan pemanfaatan dana remitansi ke sektor-sektor produktif seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Pendekatan ini tidak hanya akan memperkuat ketahanan ekonomi nasional, tetapi juga mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Karki et al., 2024).

Oleh karena itu, peran pemerintah melalui kolaborasi lintas sektor bersama lembaga keuangan, perusahaan fintech, serta organisasi masyarakat sipil menjadi sangat penting dalam menciptakan ekosistem remitansi digital yang efektif. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, remitansi digital dapat menjadi pilar kunci dalam mewujudkan ekonomi inklusif yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

## **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **4.1. KESIMPULAN**

Remitansi digital memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian ekonomi inklusif dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Transformasi remitansi dari metode konvensional menuju platform digital telah meningkatkan efisiensi transaksi, memperluas

akses keuangan, dan memperkuat ekonomi keluarga migran di berbagai daerah, terutama di wilayah terpencil. Dengan memanfaatkan teknologi finansial (fintech), remitansi digital terbukti mampu mengurangi biaya transaksi secara signifikan serta meningkatkan transparansi dan keamanan pengiriman dana.

Di sisi lain, ekonomi inklusif menempatkan prinsip keadilan dan pemerataan dalam pembangunan, memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali. Remitansi digital menjadi instrumen efektif dalam mengurangi kemiskinan, mendorong pemberdayaan ekonomi, serta memperkecil ketimpangan antarwilayah maupun antarkelompok sosial. Meskipun demikian, implementasi remitansi digital menghadapi tantangan struktural, terutama terkait minimnya infrastruktur digital, rendahnya literasi masyarakat, serta regulasi yang kurang adaptif. Optimalisasi remitansi digital membutuhkan kolaborasi aktif antara pemerintah, lembaga keuangan, sektor fintech, serta masyarakat untuk menciptakan ekosistem yang mendukung inklusi keuangan secara luas dan berkelanjutan.

## 4.2. SARAN

Untuk mengoptimalkan kontribusi remitansi digital terhadap ekonomi inklusif dan pembangunan berkelanjutan, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis. Pertama, diperlukan percepatan pembangunan infrastruktur teknologi informasi hingga ke pelosok daerah untuk menjangkau masyarakat yang masih mengalami keterbatasan akses. Kedua, implementasi program edukasi literasi digital secara intensif dan menyeluruh kepada masyarakat, khususnya di daerah kantong migran, agar manfaat remitansi digital dapat benar-benar dirasakan secara optimal. Ketiga, penyusunan regulasi yang adaptif dan inklusif sangat penting untuk memberikan ruang inovasi yang sehat bagi industri fintech, sambil tetap memperhatikan perlindungan data pribadi pengguna layanan digital. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, remitansi digital diharapkan menjadi salah satu pilar utama dalam mempercepat terwujudnya ekonomi inklusif serta mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara efektif dan berkelanjutan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Norliani, N., Sari, M. N., Safarudin, M. S., Jaya, R., Baharuddin, B., & Nugraha, A. R. (2024). Transformasi Digital Dan Dampaknya Pada Organisasi: Tinjauan Terhadap Implementasi Teknologi Informatika. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 10779-10787.
- Mowlaei, M. (2018). The Impact Of Foreign Capital Inflows On Economic Growth On Selected African Countries. *African Journal Of Economic And Management Studies*, 9(4), 523–536.
- Scott, A., Worrall, L., & Pickard, S. (2018). Migration And The 2030 Agenda For Sustainable Development. *Swiss Agency For Development And Cooperation SDC*.
- Andika Syah Putra Pratama, "Prosedur Pelaksanaan Remittance kepada Bank Muamalat Cabang Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta,

2022 Hlm. 11.

- Gibson, J., Mckenzie, D. J., & Rohorua, H. (2006). How Cost Elastic Are Remittances? Estimates From Tongan Migrants in New Zealand (Department Of Economics Working Paper Series No. 2/06). University Of Waikato. <https://Researchcommons.Waikato.Ac.Nz/Handle/10289/1639>
- Rany, A. P., Farhani, S. A., Nurina, V. R., & Pimada, L. M. (2020). Tantangan Indonesia Dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Kuat Dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Melalui Indonesia Green Growth Program Oleh BAPPENAS. *Jiep*, 20(1), 63–73.
- Bappenas. (2019). Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Sebagai Indikator Kualitas Pembangunan Nasional Dan Daerah.
- Liu, J., Chen, X., & Li, M. (2021). Standardization Protocols For Fintech Research: A Methodological Framework. *Research In International Business And Finance*, 56, 101387.
- Kim, H., & Park, S. Y. (2021). Financial Innovation And Economic Growth In Developing Countries. *Journal Of Economic Development*, 46(1), 1-27.
- Karki, D., Dahal, R. K., Bhattarai, G., Ghimire, B., & Bastola, S. (2024). The Role Of Remittances In Building Economic Resilience In Nepal: A Keynesian Analysis. *Journal Of Logistics, Informatics And Service Science*, 11(7), 411–428. <https://doi.org/10.33168/ijliss.2024.0721>
- Khan, A. A., Hidthir, M. H. Bin, Mansur, M., & Ahmad, Z. (2025). Role Of Financial Inclusion In Enhancing The Effect Of Remittance On Economic Growth In Developing Countries. *Cogent Economics And Finance*, 13(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2025.2476093>
- Priandaru, D. L. (2023). Mengenal 17 Tujuan Sdgs Pembangunan Berkelanjutan Beserta Penjelasannya. KOMPAS.COM. <https://lestari.kompas.com/read/2023/05/02/080000486/mengenal-17-tujuan-sdgs-pembangunan-berkelanjutan-beserta-penjasannya?page=all>
- Rachman, A. (2025). TKI Sumbang Devisa Rp253,3 T Buat Negara, 2025 Bakal Jadi Rp433,6trachman. CNBC Indonesia. <http://cnbcindonesia.com/Market/20250421155719-17-627527/Tki-Sumbang-Devisa-Rp2533-T-Buat-Negara-2025-Bakal-Jadi-Rp4336t>
- Saud, S., Khan, I., Zaidi, S. A. H., Haseeb, A., & Li, H. (2024). Enhancing Governance Efficiency And Digital Remittances For Sustainable Development. *Environment, Development And Sustainability*. <https://doi.org/10.1007/S10668-024-05602-5>
- Sri Hartati, Y. (2021). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 79–92. <https://doi.org/10.55049/Jeb.V12i1.74>
- Sriary Bhegawati, D. A., & Novarini, N. N. A. (2023). Percepatan Inklusi Keuangan Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Lebih Terinklusif, Dan Merata Di Era Presidensi G20. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Bisnis Dan Teknologi (AMBITEK)*, 3(1), 14–31. <https://doi.org/10.56870/Ambitek.V3i1.60>
- Zahrah, F., & Rahayu, S. (2024). Hambatan Dan Peluang Pembangunan Ekonomi Inklusif Dan Berkelanjutan Di Kawasan Kepulauan: Tinjauan Literatur Kritis. *Jurnal Archipelago*, 3(01), 67–81.

<https://doi.org/10.69853/Ja.V3i01.107>